



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA MATARAM

Sebtiara Syahrani Krosby¹, Siti Atika Rahmi², Mintasrihardi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 Februari 2024

Disetujui: 20 Maret 2024

Dipublikasikan: 31 Maret 2024

Kata Kunci:

Implementasi,
Stunting,
Terintegrasi.

Abstrak

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multifactorial secara lintas generasi, untuk menekankan masalah stunting di Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Kelurahan Jempong Baru menjadi wilayah dengan angka kasus stunting paling tinggi dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Mataram apakah sudah berjalan dengan optimal atau belum. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di kelurahan Jempong Baru belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn di Kelurahan Jempong Baru menunjukkan masih terdapat indikator yang belum tercapai dengan baik. Seperti sumber daya manusia yang berada ditingkat paling bawah khususnya para kader masih kurang dari segi kuantitas maupun kualitas. Sumberdaya finansial khusus stunting belum ada. Sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih kurang. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mampu mendukung pencapaian keberhasilan kebijakan pencegahan stunting terintegrasi.

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED STUNTING PREVENTION ACCELERATION POLICY IN MATARAM CITY

Keyword:

Implementation
Stunting,
Integrated.

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem caused by multifactorial cross-generational, to emphasize the problem of stunting in Mataram City, the Mataram City Government issued a Policy Through Governor Regulation Number 68 of 2020 Concerning Integrated Stunting Prevention and Acceleration Reduction Actions. Jempong Baru Village is the area with the highest number of stunting cases compared to other villages in Mataram City. This study aims to analyze the implementation process of the integrated stunting prevention acceleration policy in Mataram City whether it has run optimally or not. This type of research is qualitative with a descriptive

method. Data collection by interview, documentation, and observation methods. The results of this study show that the implementation of the integrated stunting prevention acceleration policy in Jempong Baru sub-district has not run optimally. Based on the results of the analysis using the theory of Van Meter and Van Horn policy implementation in Jempong Baru Village, it shows that there are still indicators that have not been achieved properly. Like human resources at the lowest level, especially cadres, are still lacking in terms of quantity and quality. Financial resources specifically for stunting do not yet exist. The attitude of the implementers, especially on public understanding of the policy is still lacking. Economic, social and political environmental conditions have not been fully able to support the achievement of the success of integrated stunting prevention policies.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Alamat korespondensi:

syahrani@krosby@gmail.com,¹ atikarahmi.siti@gmail.com,² mintaslp88@gmail.com³

PENDAHULUAN

Fenomena *stunting* masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan memerlukan perhatian khusus (Essa, Nurfindarti and Ruhyana, 2021). *Stunting* merupakan masalah gizi kronis yang bersifat *multifaktorial* dan *multigenerasi*. Banyak orang yang mengira tinggi atau pendek badan seorang anak karena faktor *genetic* (Budiastutik and Nugraheni, 2018). Kesalahan tanggapan dari masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan instansi terkait. (Sari *et al.*, 2010). *Stunting* merupakan kondisi dimana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lambat akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama (Kusdinar, 2022), dapat menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang akibat *malnutrisi*, infeksi berulang, dan kurangnya *stimulasi psikososial* yang dinyatakan dengan nilai Z-score Indeks TB/U <-2 SD (Sari *et al.*, 2022); (Departemen, 2015).

Indonesia merupakan negara dengan angka *stunting* yang relatif tinggi dibandingkan negara berpendapatan menengah lainnya (Bedasari *et al.*, 2021). Berdasarkan data dari kementerian kesehatan, pada tahun 2022 presentase angka kejadian *stunting* pada anak di bawah usia 5 tahun (balita) sebesar 21,6%, artinya masih ada sekitar 5 juta anak yang mengalami *stunting* atau gagal pertumbuhan (Kemenkes, 2022).

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikerdas), status gizi balita *stunting* di Indonesia menunjukkan angka *stunting* secara nasional terus menurun dari 24,4% pada tahun 2021 turun menjadi 21,6% pada tahun 2022 (Kemenkes, 2022). Namun

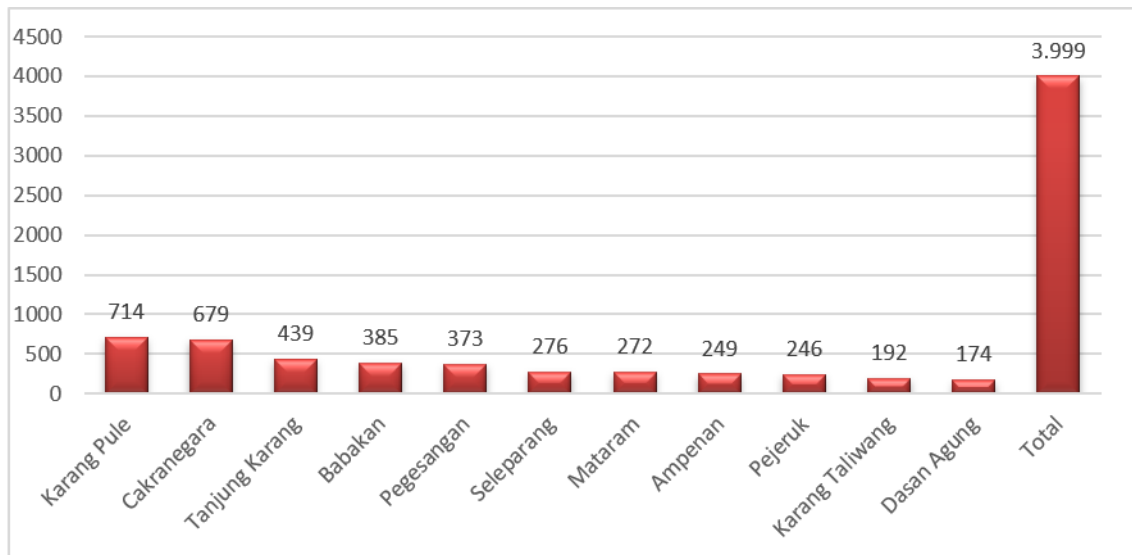
angka *stunting* tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka *stunting* maksimal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu kurang dari 20% (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022).

Tingginya angka kasus *stunting* secara nasional mendorong pemerintah pusat untuk terus berupaya menurunkan angka kasus *stunting*, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam perbaikan gizi khususnya penurunan *stunting* dan gizi buruk (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022). Peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam berkoordinasi dengan masyarakat dan organisasi peserta untuk meningkatkan angka prioritas gizi masyarakat menjadi 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Menindaklanjuti peraturan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk memperkuat pelaksanaan program pencegahan *stunting* di 100 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2017 (TNP2K, 2017). Program pencegahan *stunting* di 100 kabupaten/kota di Indonesia menggunakan kerangka *intervensi gizi spesifik* dan *sensitif gizi* dengan kelompok sasaran antara lain ibu hamil, bayi, dan anak kecil. Melalui kerangka *intervensi gizi* yang *spesifik*, konsep penanganan permasalahan gizi yang menjadi tanggung jawab sektor kesehatan berpotensi menurunkan risiko *stunting*. Kelompok sasaran utama *intervensi gizi spesifik* adalah bayi dengan HPK di bawah 1.000. Sedangkan *intervensi sensitif gizi* merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan angka *stunting* melalui program kegiatan *non-esensial* (TNP2K, 2017).

Untuk mengurangi permasalahan *stunting* di NTB, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan kebijakan pencegahan *stunting*, melalui Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Terintegrasi, Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang harus ditangani secara *multidisiplin*.

Adapun penyebab terjadinya *stunting* tidak hanya terfokus pada sektor kesehatan saja, namun juga pada sektor non-kesehatan yang *sensitive* terhadap gizi, seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, asuransi kesehatan, dan lain-lain (Ch Rosha *et al.*, 2016). Sehingga apabila terjadinya *stunting* dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik dan produktivitas ekonomi. Dan kondisi tersebut akan menghambat momentum generasi emas Indonesia tahun 2045 jadi harus segera diantisipasi (Bedasari *et al.*, 2021).

Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), *stunting* di NTB pada tahun 2022 menduduki peringkat ke-4 dari 34 provinsi dengan tingkat pertumbuhan *stunting* sebesar 32%, dan angka *stunting* di Kota Mataram termasuk tinggi, yaitu sebesar 25,8% (Kemenkes, 2022). Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa angka *stunting* di Kota Mataram tinggi dan jauh dari target pemerintah yaitu kurang dari 20%, maka pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan sebanyak 11 Puskesmas di Kota Mataram yang menjadi titik lokus pencegahan *stunting* yakni; Puskesmas Dasan Agung, Puskesmas Karang Pule, Puskesmas Cakranegara, Puskesmas Seleparang, Puskesmas Pagesangan, Puskesmas Karang Taliwang, Puskesmas Babakan, Puskesmas Mataram, Puskesmas Ampenan, Puskesmas Pejeruk, dan Puskesmas Tanjung Karang dengan total keseluruhan kasus *stunting* tercatat sekitar 15,66% atau



sekitar 3,999 balita di kerdil tahun 2023, jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan hasil penimbangan balita pada tahun 2022 sebesar 17,13%.

Grafik 1. Daftar Stunting pada Puskesmas di Kota Mataram

Sumber: Puskesmas Karang Pule, 2023

Selanjutnya berdasarkan hasil grafik 1 diatas, penentuan titik lokus *stunting* di Kota Mataram *intervensi* tahun 2023, menunjukkan terdapat 5 Puskesmas di Kota Mataram dengan kasus *stunting* tertinggi sampai terendah yakni pada Puskesmas Karang Pule sebanyak 714 balita, Puskesmas Cakranegara sebanyak 679 balita, Puskesmas Tanjung Karang sebanyak 439 balita, Puskesmas Babakan sebanyak 385 balita, dan Puskesmas Pagesangan sebanyak 373 balita. Maka berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan Puskesmas Karang Pule paling tinggi jumlah kasus *stunting*

diantara puskesmas lainnya yang berada di Kelurahan Kota Mataram. Data detail kasus *stunting* di Desa/Kecamatan Sekarbela dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Grafik 2. Daftar Kasus Stunting di Kelurahan/Kecamatan Sekarbela

Sumber : Puskesmas Karang Pule, 2023

Berdasarkan grafik 2. daftar kasus *stunting* di Kecamatan Sekarbela pada data diatas menunjukkan bahwa Kelurahan Jempong Baru paling tinggi kasus angka *stunting* diantara kelurahan lainnya yang berada di Kecamatan Sekarbela, dengan kasus angka *stunting* sebanyak 365 balita *stunting*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Risa Arieska, 2023) tentang peningkatan pengetahuan dan sikap orangtua balita ke posyandu di lingkungan Jempong Baru wilayah kerja Puskesmas Karang Pule, menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan pengetahuan pada kelompok *intervensi* sebesar 1,94 sedangkan peningkatan rata-rata sikap orangtua balita didapatkan 5,25 dan didapatkan $p=0,000$ ($p<0,005$) baik pengetahuan maupun sikap orangtua balita.

Berdasarkan permasalahan diatas maka, focus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kota Mataram dengan menggunakan model kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn serta indikator capaian lingkungan eksternal yang dianggap relevan dengan implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kota Mataram, khususnya di kelurahan Jempong Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami kenyataan Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur No 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara menggunakan informan yang ditentukan melalui *purposive sampling* sesuai *social situation* yang meliputi lokasi, aktor, serta aktifitas interaksi secara sinergis (Sugiono, 2012).

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur serta mendalam yang diharapkan bisa menggali lebih lengkap informasi yang disampaikan oleh para informan. Adapun informan pada penelitian ini ialah OPD di Kota Mataram, yakni informan pada Bappeda Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dinas Sosial Kota Mataram, Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram. Selain itu juga terdapat informan dari Kelurahan Jempong Baru yang yaitu Kepala Lurah/Sekretariat Lurah, Ahli Gizi/*Nutritionis* di Puskesmas Karang Pule, Kader Posyandu Jempong Baru serta Masyarakat.

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung untuk melihat penerapan Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kota Mataram. Sedangkan dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dan dokumen pribadi asli dokumen terkait. Document yang digunakan pada penelitian ini berupa document tertulis atau document elektronik yang terkait dengan percepatan pencegahan stunting di Kota Mataram.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada analisa kualitatif data yang dikemukakan oleh Miles serta Hubberman (1984) dalam (Sugiyono 2019). Analisis data secara kualitatif yang digunakan artinya contoh analisis interaktif, yaitu: contoh analisis yang memerlukan empat komponen proses berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 (enam) indikator yakni, standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, social, dan politik. Ke enam indikator tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur implementasi kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik

dapat diselesaikan atau tidak (Leo Agustino, 2016).

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Pada variabel standar dan sasaran kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di kota Mataram ini telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang harus ditangani secara *multidisiplin* dengan sasaran yakni pada calon ibu, ibu yang sedang mengandung bayi dan balita. Para pakar pelaksana kebijakan telah mengetahui dengan baik tentang tujuan dan standar dalam mengimplementasikan kebijakan *stunting* terintegrasi di Kota Mataram, dengan merujuk pada beberapa instansi terkait seperti; Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, dan Bappeda mampu mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kota Mataram dengan cara mengaktifkan posyandu, dan tim survei gizi melalui program gizi sensitif, yang dilakukan setiap tiga bulan untuk mengecek perkembangan sejauhmana program pencegahan dan penanganan *stunting* (program pemenuhan gizi seperti pemberian telur dan susu formula, juga dengan memperbanyak kampung Keluarga Berencana (KB)) dan membentuk duta gendre yang bertugas membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada remaja sebanyak-banyaknya untuk mencegah *stunting* dan membantu memsosialisasikan pencegahan perkawinan anak di Kota Mataram.

Selain itu juga, para pakar pelaksana dalam mengimplementasi standar dan tujuan kebijakan dengan cara mengintervensi program-programnya agar tepat sasaran dan meminimalisir kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) berupa bantuan uang tunai dan non tunai Rp300.000 - Rp3.000.00 per bulan tergantung komponen dan kriteria persyaratan program PKH, dan bantuan makanan tambahan kepada keluarga balita *stunting* seperti (susu, telur dan beras) yang bekerja sama dengan dinas sosial dalam pembagian Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Jadi, keberhasilan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan *stunting* ini didukung oleh kerjasama dan pemahaman dari setiap OPD lintas *sectoral* melalui program-program intervensi dari seluruh OPD terkait yang mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan. pemahaman dari setiap OPD dalam keberhasilan suatu program kebijakan merupakan salah satu factor keberhasilan kebijakan tersebut (Iqbal and Yusran, 2021).

2. Sumber Daya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

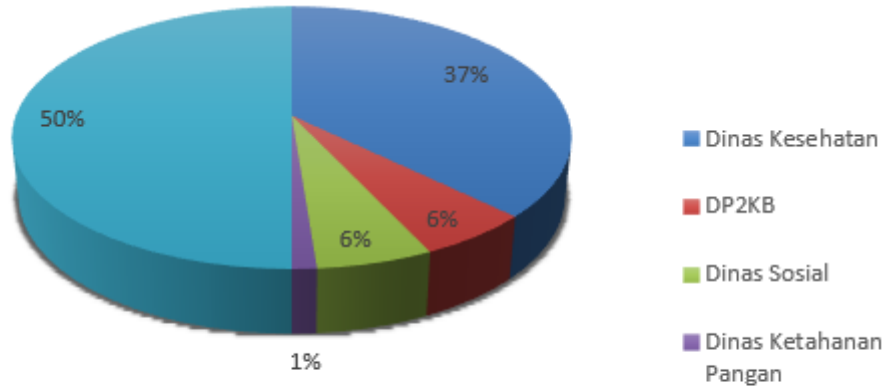
a) Sumber Daya Manusia

Keberhasilan program penurunan *stunting* wajib didukung oleh tingkat integritas kebijakan yang tinggi (Kurniawan, Misnaniarti and Flora, 2021). Dengan adanya tim koordinasi konvergensi percepatan *stunting* tersebut di setiap OPD di Kota Mataram, sangat berpengaruh dalam keberhasilan setiap proses pengimplementasian kebijakan. Namun, belum semua OPD terlibat langsung dalam penanganan *stunting*, hanya DP2KB yang memiliki tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan *stunting* yakni dengan telah membentuk Duta Generasi Berencana (Genre) sebagai salah satu penggerak untuk menurunkan angka balita kerdil atau *stunting* di Kota Mataram.

Selanjutnya kuantitas yang perlu diperhatikan pada sumber daya manusia merupakan kuantitas atau kompetensi serta kapabilitas yang dimiliki oleh pemangku kebijakan atau sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan. Dalam hal ini kompetensi yang dimiliki oleh para warga masih kurang, bisa dilihat dari segi pemahaman dalam pencegahan *stunting* yang meracu di gizi buruk. Selain itu juga kompetensi yang dimiliki para kader dalam penanganan *stunting* sudah cukup, tetapi masih kurang karena ada beberapa kendala seperti, fasilitas pelayanan posyandu kurang memadai dan gaji para kader.

b) Sumber Daya Finansial

Ketersediaan sumber daya finansial dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan angka *stunting* di Kota Mataram belum memiliki daya anggaran khusus, namun untuk penanganan *stunting* di Kota Mataram masih menggunakan APBD, dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 seperti pada gambar berikut ini:



Sumber: Bappeda Kota Mataram 2023

Gambar 3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram, Tahun 2023

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa anggaran penanganan *stunting* di Kota Mataram pada tahun 2023 OPD paling banyak menerima pendana yaitu pertama; dinas kesehatan dengan jumlah sebesar 60,99%, kedua; dinas social sebesar 9,41%, ketiga; DP2KB sebesar 9,25%, dan keempat; dinas ketahanan pangan sebesar 1,94%. Dari total anggaran penanganan *stunting* diatas dapat simpulkan bahwa yang menjadi titik tolak ukur untuk mempercepat penurunan angka *stunting* di kota Mataram berada pada dinas/OPD kesehatan karena merupakan *leader* dari *multi-sektoral* yang bergerak untuk mengintervensi seluruh OPD untuk bekerja sama mewujudkan NTB emas ditahun 2024. Keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh anggaran untuk memperlancarkan program-program intervensi kebijakan *stunting* dan harus memiliki anggaran khusus agar program pencegahan *stunting* bisa terlaksana dengan baik (Febrian and Yusran, 2021).

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam hal ini pembagian wewenang dan pengawasan telah dijelaskan melalui peraturan gubernur nomor 68 tahun 2020, bab III perencanaan dan pelaksanaan, bagian keempat pengorganisasian, paragraf 2 tentang *organisasi aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi tingkat kabupaten/kota*, pasal 9 ayat (1); (2); (3); (4). Selain pembagian wewenang pada kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi sudah dilaksanakan dengan baik serta melibatkan berbagai seluruh OPD *lintas sector*.

Sebagai salah satu point pengukur dalam menunjang keberhasilan dari pengimplementasian suatu kebijakan maka setiap OPD wajib memiliki SOP nya sendiri (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022), namun dalam hal ini hanya 2 (dua)

instansi yang mempunyai SOP penanganan *stunting* yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Mataram terkait percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi, dan beberapa lintas sector seperti Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan, belum memiliki SOP terkait pencegahan *stunting* secara langsung. Dan ketersediaan SOP untuk tingkat kelurahan dan para kader juga belum tersedia.

Tingkat pengawasan atau evaluasi dalam melaksanakan kebijakan merupakan salah satu tahapan keberhasilan pengimplementasian kebijakan (Iqbal and Yusran, 2021). Dalam hal ini tingkat pelaksana pengawasan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi telah dilaksanakan pada setiap masing-masing OPD melalui aplikasi supervisi dan penilaian yang dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali, bersama seluruh tim koordinasi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi pada tingkat Kelurahan Jempong Baru.

4. Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana

Dalam hal ini, sikap atau kecenderungan para pelaksana kebijakan merupakan salah satu factor dalam menentukan berhasil dan tidak suatu kebijakan tersebut di implementasikan, juga diperlukan pemahaman dari setiap OPD terkait kebijakan yang perlu dimiliki oleh para pelaksanaanya. Pemahaman isi kebijakan dalam hal ini hanya sebatas pada OPD saja, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan *stunting* sulit untuk di implementasikan. Hal ini yang mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Serta pemahaman para kader dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi masih terkendala pada honor para kader yang mengakibatkan acuh tak acuh saat menjalankan kebijakan. Sehingga perlu di intervensi pembinaan yang lebih untuk para kader karena mereka memiliki peran yang tak kalah penting dengan setiap OPD yang terlibat dalam penanganan *stunting* terintegrasi.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam mewujudkan keberhasilan pengimplementasian kebijakan diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif, semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, maka kemungkinan kesalahan akan sedikit. Koordinasi serta komunikasi adalah prosedur sekaligus syarat primer dalam memilih keberhasilan implementasi kebijakan (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022).

Koordinasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan dilaksanakan melalui pengenalan atau penyuluhan yang diberikan terkait pencegahan *stunting*, tanda-tanda

gejala awal bayi terpapar *stunting* yang sifatnya mengedukasi kepada warga supaya bisa mencegah sedini mungkin, dan mengedukasi cara mengelola makanan tambahan, rapat-rapat rutin serta pelaksanaan pada setiap 3 bulan dilakukan evaluasi oleh puskesmas (Essa, Nurfindarti and Ruhyana, 2021). Selain itu kesadaran masyarakat dalam pencegahan *stunting* dalam melaksanakan koordinasi serta komunikasi dengan para pelaksana kebijakan percepatan pencegahan *stunting* di Kelurahan Jempong Baru telah terorganisasi, namun para pelaksana kebijakan kesulitan dalam mengajak masyarakat agar berpartisipasi. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi adalah salah satu factor keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi (Beal *et al.*, 2018).

Pada lintas sektor kelurahan Jempong Baru hasil koordinasi dan komunikasi tim evaluasi tingkat puskesmas melakukan komunikasi dan pengawasan melalui *focus group discussion* (FDG) dengan para kader PKK (Imron *et al.*, 2022). Sangat berpengaruh dalam mengidentifikasi masalah strategi implementasi penanganan *stunting* berjalan dengan baik serta mengetahui strategi kendala apasaja yang terjadi di lapangan. Hal ini sesuai dengan temuan pada peneliti ini yang menunjukkan bahwa komunikasi antar OPD dengan warga masyarakat masih kurang, sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan.

6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik

Faktor lingkungan sosial sangat dibutuhkan demi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sebab keberadaan suatu kebijakan perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial dan partisipasi masyarakat (Sunaryo, Candradewini and Arifianti, 2022).

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang *stunting* sangat berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan *stunting* (Putri and Sukmana, 2022). Maka perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait *stunting* serta cara pencegahannya. Oleh sebab itu, untuk mendukung kondisi lingkungan sosial yang baik maka pemerintah kota mataram berupaya meningkatkan pengetahuan kepada orang tua melalui kegiatan KP-ASI. Akan tetapi, jika hanya mengandalkan dari satu sektor saja, maka akan sulit terimplementasinya suatu kebijakan. Sehingga diperlu komitmen dari pelaksana lainnya dalam meningkatkan kondisi sosial yang ada di kelurahan Jempong Baru. Untuk menekan prevalensi angka *stunting* maka di perlukan peningkatan status social ekonomi dan kontrol terhadap sumber daya, dengan melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah gizi pada anak-anak (Jubayer, Islam and Nayan, 2022).

Oleh karena itu, pemerintah Kota Mataram melakukan intervensi melalui pemberian bantuan secara langsung. Dalam mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi, Dinas Sosial Kota Mataram dan khususnya Puskesmas Karang Pule, Kelurahan Jempong Baru memberikan kegiatan seperti pos gizi, dan pemberian protein berupa telur dan susu. Pemberian makan telur atau protein hewani pada anak balita merupakan salah satu strategi untuk mengatasi *stunting* pada anak balita (Dewi Satiawati and Januraga, 2018).

Namun, dalam pengimplementasiannya tidak sesuai karena faktor perekonomian yang dialami oleh suatu keluarga balita *stunting* menyebabkan pemberian 30 butir telur yang seharusnya bisa maksimal diberikan selama 1 bulan penuh kepada anak *stunting*, akan tetapi telur tersebut dimakan secara bersama-sama oleh keluarganya, maka hal ini dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengimplementasian percepatan pencegahan kebijakan *stunting*.

Jadi, berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi, di Kota Mataram proses implementasi kebijakan *stunting* dilakukan secara terintegrasi dengan beberapa OPD lintas sektor terkait, berikut dokumen berisi alur tahapan proses *kolaborasi* implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi dengan beberapa OPD lintas sektor di kota mataram.



Gambar 4. Alur Tahapan Proses Kolaborasi Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Dengan Beberapa Organisasi Perangkat Daerah Lintas Sektor di Kota Mataram Menggunakan Edwarpap (2023).

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa alur proses kolaborasi implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi oleh pemerintah kota Mataram bersama dengan beberapa organisasi perangkat daerah lintas sektor sebagai langkah upaya pencegahan stunting. Pencegahan stunting terintegrasi dilakukan berdasarkan peraturan gubernur nomor 68 tahun 2020 tentang aksi percepatan penurunan stunting terintegrasi

PENUTUP

Pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kota Mataram Kelurahan Jempong Baru masih belum berjalan dengan optimal yang ditentukan oleh 6 indikator pencapaian yakni; standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi dan social dan politik. Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan optimal seperti; sumber daya manusia masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas khususnya para pakar pelaksana yang berada pada tingkat paling bawah yakni para kader dan masyarakat, sumber data finansial tidak memiliki adanya anggaran khusus. Karakteristik badan pelaksana belum terpenuhi dengan baik karena masih terdapat pelaksana pada tingkat paling bawah belum mempunyai SOP nya sendiri. Sikap atau kecenderungan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sangat baik, namun pemahaman para pelaksana dalam menjalankan kebijakan masih kurang seperti dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan. Dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana pada setiap OPD yang berada pada tingkat paling bawah masih kurang, sehingga para pelaksana kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beal, T. *et al.* (2018) 'A review of child stunting determinants in Indonesia', *Maternal and Child Nutrition*, 14(4), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>.
- Bedasari, H. *et al.* (2021) 'Implementasi Kebijakan Cegah Stunting Di Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun 1)', *Jurnal Awam*, 1(2), pp. 45–50.
- Budiastutik, I. and Nugraheni, A. (2018) 'Determinants of Stunting in Indonesia: A Review Article', *International Journal Of Healthcare Research*, 1(1), pp. 2620–5580.
- Ch Rosha, B. *et al.* (2016) 'Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan Masalah Gizi Balita

di Kota Bogor (Roles of Sensitive and Spesific Nutritional Interventions in The Improvement of Nutritional Problems', *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(2), pp. 127–138.

Departemen, W.N. (2015) *Stunting in a Nutshell*, <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>. Available at: <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell> (Accessed: 28 September 2023).

Dewi Satiawati, K.D.K. and Januraga, P.P. (2018) 'Attitudes toward Supplemental Nutrition Assistance Programs in Caregivers of Children with Moderate–Acute Malnutrition Younger than 5 Years in Denpasar, Bali: A Qualitative Study', *Food and Nutrition Bulletin*, 39(3), pp. 465–474. Available at: <https://doi.org/10.1177/0379572118788663>.

Essa, W.Y., Nurfindarti, E. and Ruhyana, N.F. (2021) 'Strategies for Handling Stunting in Bandung City', *Jurnal Bina Praja*, 13, pp. 15–28. Available at: <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.15-28>.

Febrian, F. and Yusran, R. (2021) 'Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), pp. 11–21. Available at: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>.

Imron, A. *et al.* (2022) 'Sinergi Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur', *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), pp. 239–243. Available at: <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1sp.239-243>.

Iqbal, M. and Yusran, R. (2021) 'Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(2), pp. 109–116. Available at: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i2.245>.

Jubayer, A., Islam, M.H. and Nayan, M.M. (2022) 'Malnutrition among under-five children in St. Martin's Island, Bangladesh: A cross-sectional study on prevalence and associated factors', *SAGE Open Medicine*, 10. Available at: <https://doi.org/10.1177/20503121221116246>.

Kemenkes (2022) 'Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022', *Kemenkes*, pp. 1–7.

Kurniawan, I., Misnaniarti, M. and Flora, R. (2021) 'Analisis Implementasi Intervensi Gizi Spesifik dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara', *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(4), p. 328. Available at: <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i4.10089>.

Kusdinar, R. (2022) 'Implementasi Program Akademi Keluarga Jabar Juara Dalam Mencegah Children Stunting Di Kabupaten Sumedang', *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 7, pp. 32–40. Available at: <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/590%0Ahttps://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/download/590/247>.

Leo Agustino (2016) *dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

Putri, F.F. and Sukmana, H. (2022) 'Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan

Stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo', *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), pp. 224–235. Available at: <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5168>.

Sari, H.P. *et al.* (2022) 'Hubungan Keragaman Asupan Protein Hewani, Pola Asuh Makan, Dan Higiene Sanitasi Rumah Dengan Kejadian Stunting', *Journal of Nutrition College*, 11(1), pp. 18–25. Available at: <https://doi.org/10.14710/jnc.v11i1.31960>.

Sari, M. *et al.* (2010) 'Higher household expenditure on animal-source and nongrain foods lowers the risk of stunting among children 0-59 months old in Indonesia: Implications of rising food prices', *Journal of Nutrition*, 140(1), pp. 195S-200S. Available at: <https://doi.org/10.3945/jn.109.110858>.

Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, D.G. (2022) 'Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting', *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), pp. 97–104.

Sugiono (2012) *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, D.R., Candradewini, C. and Arifianti, R. (2022) 'Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung', *Responsive*, 4(4), p. 205. Available at: <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>.

TNP2K (2017) '100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting): Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan', *Jakarta*, 2(c), p. 287.